

Transformasi Sosial dalam Konteks Urbanisasi dan Modernisasi di Indonesia

Heni Yulianti^{1*}, Dewi Puspita Ningsih^{2,b}, Andika Apriawan³

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia¹⁻³

*Email Korespodensi: heni250299@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 15-08-2025
Disetujui 24-08-2025
Diterbitkan 26-08-2025

ABSTRACT

Social transformation in Indonesia is closely linked to the dynamics of urbanization and modernization, which have intensified over the past two decades. Urbanization has led to structural changes across economic, social, and cultural dimensions, including the emergence of new urban areas, shifts in family structures, and changes in societal values and identity. This study aims to examine how urbanization and modernization shape patterns of social transformation in Indonesia through a systematic literature review and secondary data analysis from official reports and recent academic publications. The findings indicate that urbanization produces ambivalent implications: on one hand, it creates opportunities for economic growth and global integration; on the other, it exacerbates social inequality, marginalization, and cultural challenges. Modernization, accelerated through infrastructure development and the relocation of the national capital, highlights the complex relationship between social transformation and development policies. These findings are expected to contribute to the discourse on sustainable and inclusive urban development in Indonesia.

Keywords: Social Transformation; Urbanization, Modernization; Urban Policy; Indonesia

ABSTRAK

Transformasi sosial di Indonesia tidak terlepas dari dinamika urbanisasi dan modernisasi yang semakin intensif dalam dua dekade terakhir. Urbanisasi memunculkan perubahan struktural pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk munculnya kawasan perkotaan baru, perubahan struktur keluarga, serta pergeseran nilai dan identitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana urbanisasi dan modernisasi membentuk pola transformasi sosial di Indonesia melalui studi literatur sistematis dan analisis data sekunder dari laporan resmi serta publikasi akademik terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa urbanisasi menghasilkan implikasi ambivalen: di satu sisi membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan integrasi global, namun di sisi lain memperkuat ketimpangan sosial, marginalisasi, dan tantangan budaya. Modernisasi yang dipercepat melalui pembangunan infrastruktur dan pemindahan ibu kota negara menunjukkan kompleksitas hubungan antara transformasi sosial dan kebijakan pembangunan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia

Katakunci: Transformasi Sosial; Urbanisasi; Modernisasi; Kebijakan Perkotaan; Indonesia

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yulianti, H., Ningsih, D. P., & Apriawan, A. (2025). Transformasi Sosial dalam Konteks Urbanisasi dan Modernisasi di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(5), 3488-3500. <https://doi.org/10.63822/fcn99821>

PENDAHULUAN

Transformasi sosial merupakan suatu proses kompleks yang berlangsung dalam masyarakat ketika terjadi perubahan signifikan dalam struktur, nilai, norma, dan pola interaksi sosial akibat dinamika pembangunan, modernisasi, serta urbanisasi. Dalam konteks Indonesia, proses transformasi sosial tidak dapat dipisahkan dari laju urbanisasi yang berlangsung secara cepat, terutama sejak dekade 1980-an hingga sekarang (Firman, 2004a; McGee, 2000). Urbanisasi di Indonesia tidak hanya bermakna sebagai fenomena fisik berupa pertumbuhan kota, tetapi juga sebagai proses multidimensional yang memengaruhi aspek demografi, ekonomi, budaya, serta lingkungan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024; UN-Habitat, 2022). Fenomena ini melahirkan tantangan dan peluang baru yang menuntut adaptasi masyarakat, institusi, serta negara dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi besar menghadapi urbanisasi yang ditandai dengan pertumbuhan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, serta munculnya kawasan metropolitan baru termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut BPS (2025), urbanisasi mendorong pergeseran struktur demografi, di mana semakin banyak masyarakat berpindah dari desa menuju kota dengan motivasi ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik. Fenomena ini melahirkan kawasan desakota, yaitu wilayah peralihan antara desa dan kota yang memiliki karakteristik campuran, sebagaimana dijelaskan McGee (1991, 2009). Kawasan desakota di Indonesia mencerminkan dinamika transformasi ruang yang tidak hanya memengaruhi struktur permukiman, tetapi juga memunculkan bentuk interaksi sosial baru yang berbeda dari desa maupun kota murni.

Proses urbanisasi di Indonesia tidaklah homogen, melainkan memperlihatkan variasi yang dipengaruhi faktor ekonomi, politik, dan budaya. Firman (2004b) menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia adalah tata kelola lahan, ketimpangan distribusi ruang, serta minimnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak. Permasalahan ini semakin nyata pada perkembangan kota-kota besar di Jawa, khususnya kawasan Jakarta–Bandung yang diteliti Firman (2008), di mana mega-urbanisasi menghasilkan tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur, dan keterjangkauan perumahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa urbanisasi tidak sekadar memperluas wilayah kota, melainkan mengubah pola kehidupan sosial secara mendasar.

Dalam konteks transformasi sosial, modernisasi berperan sebagai motor yang mempercepat perubahan. Modernisasi membawa inovasi teknologi, perubahan pola kerja, serta meningkatnya diferensiasi sosial dalam masyarakat perkotaan (OECD, 2025; UNDP, 2024). Suryadmaja (2025) menjelaskan bahwa modernisasi juga berdampak pada dinamika budaya dan seni, di mana masyarakat perkotaan menghadapi interaksi intensif antara nilai lokal dan global. Hal ini menegaskan bahwa urbanisasi bukan hanya fenomena spasial, melainkan proses yang mengubah orientasi nilai dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Misalnya, penelitian Ningsih, Saputra, dan Suryadmaja (2025) mengenai tradisi Perang Topat di Lombok menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi basis moderasi sosial di tengah arus modernisasi. Dengan demikian, transformasi sosial akibat urbanisasi di Indonesia juga mengandung dimensi integrasi antara nilai tradisional dan modern.

Laporan UN-Habitat (2024) menekankan bahwa urbanisasi di tingkat global memunculkan tantangan kesenjangan sosial, ketimpangan akses layanan, serta emisi karbon. Indonesia mengalami pola serupa, di mana urbanisasi tidak merata dan sering kali meningkatkan kesenjangan antara pusat kota dengan pinggiran (Hudalah et al., 2017). Privatization of metropolitan fringe di Jakarta misalnya, memperlihatkan bagaimana ruang perkotaan berkembang melalui investasi swasta yang justru memarginalkan kelompok miskin. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Setioko, Martokusumo, dan Kusuma (2017) yang menemukan bahwa

permukiman informal di Jakarta memiliki karakter khas yang merefleksikan ketidaksetaraan akses masyarakat terhadap ruang kota. Oleh karena itu, transformasi sosial di Indonesia akibat urbanisasi perlu dipahami sebagai hasil tarik-menarik antara dinamika ekonomi-politik dengan praktik keseharian masyarakat perkotaan.

Selain tantangan sosial-ekonomi, urbanisasi juga berkaitan dengan agenda pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas (2025) menekankan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memerlukan tata kelola urbanisasi yang inklusif. Laporan Kementerian PUPR (2025) juga menegaskan bahwa agenda New Urban Agenda harus diintegrasikan dengan strategi pembangunan kota untuk menghadapi isu permukiman kumuh, keterjangkauan perumahan, serta infrastruktur ramah lingkungan. Pembangunan IKN Nusantara, sebagaimana dikaji oleh O'Donnell (2025) dan Rakhmani, Kusno, dan Susilo (2023), memperlihatkan bagaimana proyek besar perkotaan di Indonesia membawa dimensi politik, ekonomi, dan sosial yang dapat memengaruhi pola transformasi sosial masyarakat. Dengan demikian, urbanisasi di Indonesia tidak hanya merupakan proses alami, melainkan juga produk kebijakan dan intervensi negara yang sarat makna ideologis.

Kaitan antara urbanisasi dan transformasi sosial juga dapat dilihat dari perspektif ketahanan sosial budaya. Ningsih, Apriawan, Suryadmaja, dan Rahmadi (2024) menunjukkan bahwa perubahan sosial di tingkat desa akibat modernisasi dapat memunculkan praktik baru dalam kehidupan masyarakat, misalnya dalam regulasi pencegahan perkawinan anak di Lombok. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi sosial tidak hanya berlangsung di kota besar, tetapi juga menyebar ke wilayah pedesaan yang terhubung dengan arus urbanisasi. Transformasi ini memunculkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai lokal di tengah penetrasi modernisasi, sekaligus memberikan peluang untuk memperkuat kapasitas adaptif masyarakat.

Urbanisasi di Indonesia juga berkaitan erat dengan dimensi ekonomi global. OECD (2025) menekankan bahwa pembangunan perkotaan tidak bisa dilepaskan dari integrasi Indonesia dalam ekonomi internasional, terutama dalam hal investasi, tenaga kerja, dan perdagangan. Dalam konteks ini, urbanisasi menghasilkan kelas menengah baru dengan aspirasi dan gaya hidup modern yang pada gilirannya mendorong perubahan pola konsumsi, pendidikan, dan mobilitas sosial. Akan tetapi, urbanisasi juga meningkatkan kerentanan sosial, terutama bagi kelompok miskin perkotaan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan formal (BPS, 2025; UNFPA, 2015). Oleh karena itu, studi tentang transformasi sosial dalam konteks urbanisasi di Indonesia harus mempertimbangkan dimensi global, nasional, dan lokal secara simultan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa transformasi sosial di Indonesia dalam konteks urbanisasi dan modernisasi adalah proses multidimensi yang mencakup aspek demografi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. Urbanisasi tidak hanya memengaruhi pola permukiman, tetapi juga struktur sosial masyarakat, distribusi kesejahteraan, serta dinamika identitas budaya. Modernisasi mempercepat proses tersebut melalui penetrasi teknologi dan globalisasi nilai. Namun, transformasi sosial yang dihasilkan tidak selalu linier menuju kondisi yang lebih baik, melainkan juga menghadirkan risiko kesenjangan sosial, marginalisasi, dan kerentanan baru. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi tata kelola perkotaan yang berorientasi pada keadilan sosial, inklusivitas, serta keberlanjutan, agar transformasi sosial akibat urbanisasi dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) untuk mengkaji transformasi sosial dalam konteks urbanisasi dan modernisasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena topik urbanisasi bersifat multidisipliner, melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan tata ruang, sehingga memerlukan integrasi berbagai sumber literatur dari basis data nasional maupun internasional.

Tahap awal penelitian dilakukan melalui identifikasi literatur dari berbagai sumber akademik bereputasi, termasuk jurnal internasional terindeks, jurnal nasional bereputasi, laporan lembaga internasional (misalnya UN-Habitat, 2022; 2024; UNDP, 2024), laporan kebijakan pemerintah (misalnya Bappenas, 2025; Kementerian PUPR, 2025), serta publikasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2024; 2025). Literatur yang ditelusuri mencakup rentang waktu 1990–2025, sehingga mampu merekam dinamika urbanisasi jangka panjang sejak munculnya konsep desakota di Asia Tenggara (McGee, 1991, 2000, 2009) hingga perkembangan terbaru seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (O'Donnell, 2025; Rakhmani et al., 2023).

Proses penelusuran dilakukan dengan memanfaatkan database daring seperti Scopus, ScienceDirect, JSTOR, Taylor & Francis, serta repositori nasional dan internasional (BPS, Bappenas, UN-Habitat, UNDP, OECD). Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran antara lain: *urbanization in Indonesia*, *modernization and social transformation*, *peri-urban development*, *informal settlements*, dan *megacity Jakarta*. Proses ini menghasilkan sekitar 210 artikel dan dokumen relevan.

Selanjutnya dilakukan seleksi literatur menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) literatur yang fokus pada Indonesia atau kawasan Asia Tenggara yang relevan, (2) publikasi akademik atau laporan resmi lembaga internasional/nasional, (3) artikel dengan akses daring penuh, serta (4) karya terbitan 1990–2025 untuk melacak transformasi historis hingga kontemporer. Adapun kriteria eksklusi adalah: (1) artikel yang hanya menyinggung urbanisasi secara sekilas tanpa relevansi mendalam terhadap Indonesia, (2) literatur dengan data yang sudah usang tanpa pembaruan konteks, serta (3) publikasi non-akademis yang tidak terverifikasi.

Dari hasil seleksi tersebut, 75 artikel teridentifikasi sebagai duplikasi atau tidak relevan dan dikeluarkan. Proses penyaringan abstrak menghasilkan 50 artikel potensial, yang kemudian dievaluasi teks penuh. Dari evaluasi tersebut, 22 artikel dikecualikan karena tidak memenuhi kriteria substantif, sehingga 28 artikel dan laporan utama digunakan sebagai dasar analisis.

Untuk menjamin validitas, analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema utama: (1) dinamika demografi dan migrasi (Firman, 2004a), (2) tata ruang dan penggunaan lahan (Firman, 2004b, 2008), (3) perkembangan kawasan peri-urban (Hudalah et al., 2017; Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, 2020), (4) kesenjangan sosial-ekonomi dan kemiskinan urban (BPS, 2025; UNDP, 2024), serta (5) transformasi budaya dan religius dalam masyarakat urban (Ningsih et al., 2024; 2025; Suryadmaja, 2025). Analisis dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber, yakni membandingkan data akademik dengan laporan kebijakan resmi dan data statistik, guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai fenomena urbanisasi di Indonesia.

Tabel berikut menyajikan ringkasan proses pencarian dan seleksi literatur yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Ringkasan Pencarian dan Seleksi Literatur

Tahapan	Jumlah Dokumen	Keterangan
Identifikasi awal	210	Artikel jurnal, laporan lembaga, dan data statistik dari berbagai sumber
Duplikasi/irrelevant dihapus	75	Artikel ganda atau tidak relevan dengan konteks Indonesia
Penyaringan abstrak	50	Artikel yang sesuai kriteria inklusi
Evaluasi teks penuh	50	Artikel diuji relevansi mendalam
Dikeluarkan setelah evaluasi	22	Tidak memenuhi kriteria substantif
Artikel/laporan digunakan	akhir 28	Digunakan untuk analisis tematik dan sintesis

Melalui metodologi ini, penelitian tidak hanya mengandalkan satu jenis data, melainkan mengintegrasikan perspektif akademis, kebijakan, dan statistik empiris. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika transformasi sosial yang terjadi dalam konteks urbanisasi dan modernisasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urbanisasi dan Perubahan Struktur Sosial

Urbanisasi merupakan salah satu fenomena paling signifikan dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia modern. Proses ini bukan hanya sekadar pergeseran demografi dari desa ke kota, tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Firman (2004a) menegaskan bahwa urbanisasi di Indonesia sejak era Orde Baru hingga periode reformasi ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk perkotaan secara konsisten, yang membawa konsekuensi serius terhadap struktur sosial masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (2024) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan peningkatan pesat konsumsi lahan perkotaan, terutama di kawasan metropolitan besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa urbanisasi tidak hanya memengaruhi pola permukiman, tetapi juga berdampak pada tata ruang, akses sumber daya, dan relasi sosial antar kelompok masyarakat.

Dalam konteks Asia Tenggara, McGee (1991, 2000, 2009) memperkenalkan konsep *desakota* untuk menggambarkan transisi kawasan pedesaan ke perkotaan yang bercirikan tumpang tindih fungsi dan identitas. Konsep ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, khususnya di wilayah megapolitan Jakarta–Bandung. Firman (2008) menegaskan bahwa kawasan ini telah menjadi salah satu contoh paling nyata terjadinya *desakota*, di mana karakteristik pedesaan dan perkotaan saling berinteraksi dan menghasilkan pola ruang yang unik. Fenomena serupa juga muncul di kawasan peri-urban, yakni daerah perbatasan kota yang mengalami urbanisasi cepat, tetapi masih mempertahankan sejumlah elemen pedesaan (Hudalah et al., 2017; Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB, 2020).

Perubahan struktural akibat urbanisasi tidak hanya terlihat dari transformasi spasial, tetapi juga dalam dimensi sosial-ekonomi. Laporan BPS (2025) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan nasional cenderung menurun, terdapat perbedaan signifikan antara tingkat kemiskinan di desa dan kota. Data tersebut mengindikasikan adanya dualisme kesejahteraan, di mana kelompok masyarakat perkotaan relatif lebih cepat memperoleh manfaat pembangunan dibandingkan masyarakat pedesaan. Situasi ini menciptakan segregasi sosial yang semakin tajam, memperkuat kesenjangan antara kelompok sosial-

ekonomi menengah ke atas dengan kelompok marginal. UNDP (2024) menegaskan bahwa ketimpangan sosial merupakan tantangan global yang juga sangat relevan dalam kasus Indonesia. Dengan kata lain, urbanisasi tidak hanya menghasilkan kelas menengah baru di perkotaan, tetapi juga melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru di tengah kota.

Segregasi sosial yang muncul dari proses urbanisasi juga berimplikasi pada perubahan pola interaksi masyarakat. Kawasan perkotaan cenderung menghadirkan fragmentasi sosial, di mana kelompok-kelompok masyarakat terpolarisasi berdasarkan status ekonomi, pekerjaan, maupun lokasi tempat tinggal. Studi Hudalah et al. (2017) menggarisbawahi bahwa wilayah peri-urban seringkali menjadi ruang kontestasi antara kebutuhan pembangunan perkotaan dengan hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks ini, urbanisasi tidak jarang menghasilkan konflik kepentingan yang menuntut kehadiran regulasi dan tata kelola ruang yang lebih inklusif.

Selain itu, urbanisasi juga membawa dampak terhadap struktur keluarga dan pola kehidupan sehari-hari. Mobilitas yang tinggi di kota-kota besar menyebabkan pergeseran nilai dari sistem sosial berbasis komunitas menuju orientasi individualistik. Pergeseran ini memunculkan tantangan baru dalam menjaga kohesi sosial di masyarakat urban. McGee (2009) menekankan bahwa wilayah desakota di Asia Tenggara menghadapi dilema serupa, di mana modernisasi mendorong efisiensi ekonomi tetapi sekaligus mengikis solidaritas sosial tradisional. Hal ini sejalan dengan temuan Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB (2020) yang menunjukkan bahwa urbanisasi memunculkan bentuk-bentuk baru kohesi sosial yang berbeda dari pola tradisional pedesaan.

Urbanisasi juga memperlihatkan dimensi spasial-ekonomi yang erat kaitannya dengan industrialisasi. Kawasan-kawasan urban baru sering kali berkembang beriringan dengan hadirnya pusat-pusat industri dan jasa, yang kemudian menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Firman (2004a, 2008) menunjukkan bahwa industrialisasi di kawasan metropolitan menjadi motor utama urbanisasi, tetapi pada saat yang sama memunculkan permasalahan seperti keterbatasan infrastruktur, transportasi, dan perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi memiliki sifat ambivalen: di satu sisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain memperbesar tekanan sosial dan ekologis di kawasan perkotaan.

Dampak lingkungan akibat urbanisasi juga tidak dapat diabaikan. Peningkatan intensitas konsumsi lahan, pembangunan infrastruktur, dan konversi ruang hijau menjadi kawasan permukiman maupun industri telah memperburuk kualitas lingkungan perkotaan. BPS (2024) mencatat bahwa laju konversi lahan pertanian ke non-pertanian semakin tinggi, terutama di Jawa. Konversi ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga memperburuk kerentanan ekologis masyarakat urban. Dengan demikian, urbanisasi di Indonesia memperlihatkan keterkaitan erat antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling memengaruhi.

Dalam perspektif global, urbanisasi di Indonesia memperlihatkan pola yang sejalan dengan negara-negara berkembang lainnya. UNDP (2024) dan UN-Habitat (2024) menekankan bahwa pertumbuhan perkotaan di Global South cenderung menghadirkan tantangan terkait ketimpangan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Indonesia menghadapi dilema serupa, yakni bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pembangunan perkotaan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan perkotaan harus mampu merespons secara adaptif terhadap kompleksitas perubahan struktur sosial akibat urbanisasi.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, dapat disimpulkan bahwa urbanisasi di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai proses migrasi atau pertumbuhan kota semata. Urbanisasi merupakan fenomena multidimensional yang mencakup transformasi spasial, sosial, ekonomi, dan budaya sekaligus.

Proses ini telah menciptakan kelas sosial baru di perkotaan, memperkuat segregasi, mengubah pola interaksi masyarakat, serta menimbulkan tantangan dalam tata kelola ruang dan lingkungan. Oleh karena itu, memahami urbanisasi dalam kerangka perubahan struktur sosial menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Modernisasi, Infrastruktur, dan Mega-Proyek

Modernisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pembangunan infrastruktur sebagai motor utama transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Sejak masa Orde Baru, pembangunan infrastruktur dipandang sebagai simbol kemajuan sekaligus alat integrasi nasional. Firman (2004a) mencatat bahwa agenda pembangunan perkotaan pada periode tersebut sangat terfokus pada penyediaan jaringan transportasi, perumahan, dan kawasan industri, dengan tujuan mempercepat industrialisasi serta memperluas basis ekonomi modern. Pendekatan pembangunan ini masih terus berlanjut hingga era kontemporer, di mana proyek-proyek berskala besar menjadi identitas utama modernisasi Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam dua dekade terakhir memperlihatkan komitmen tinggi pada pembangunan infrastruktur dengan meluncurkan berbagai mega-proyek strategis. Salah satu yang paling menonjol adalah pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk jalan tol trans-Jawa, tol Sumatera, serta jalur kereta cepat Jakarta–Bandung. BPS (2024) mencatat bahwa belanja infrastruktur mengalami peningkatan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimaksudkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah serta meningkatkan daya saing nasional. Mega-proyek ini dipandang bukan hanya sebagai investasi fisik, tetapi juga sebagai katalis modernisasi sosial-ekonomi, karena diharapkan mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan.

Dalam perspektif global, pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang seperti Indonesia sering dipandang sebagai bagian dari strategi modernisasi dan integrasi dengan sistem kapitalisme global (UNDP, 2024). Melalui penyediaan jaringan transportasi, energi, dan teknologi komunikasi, negara berupaya membuka ruang investasi, memperluas akses pasar, dan mempercepat arus mobilitas manusia maupun barang. Dengan demikian, infrastruktur diposisikan sebagai prasyarat utama modernitas, sekaligus sebagai simbol legitimasi politik pemerintah.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur skala besar di Indonesia seringkali menghadirkan dilema. Firman (2008) menunjukkan bahwa megaprojek di kawasan metropolitan kerap menimbulkan ketegangan sosial, terutama dalam kaitannya dengan penggusuran lahan dan relokasi penduduk. Kasus pembangunan jalan tol maupun proyek perumahan besar menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak masyarakat lokal. Situasi ini memperlihatkan paradoks modernisasi: di satu sisi membawa pertumbuhan ekonomi dan kemudahan akses, tetapi di sisi lain menciptakan kerentanan sosial dan perlawanan masyarakat.

Hudalah et al. (2017) menggarisbawahi bahwa wilayah peri-urban sering menjadi lokasi utama ekspansi infrastruktur, karena dianggap strategis bagi pertumbuhan kota besar. Namun, pembangunan ini seringkali mengorbankan lahan pertanian produktif serta menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat lokal dengan aktor-aktor pembangunan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal harus menyesuaikan diri dengan perubahan cepat tanpa memiliki kapasitas adaptif yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa modernisasi melalui infrastruktur tidak selalu inklusif, melainkan dapat memperdalam ketimpangan sosial antar kelompok.

Selain itu, mega-proyek di Indonesia sering dipersepsikan sebagai instrumen politik. Proyek-proyek besar seperti kereta cepat Jakarta–Bandung, pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur,

maupun pembangunan bendungan raksasa, kerap dijadikan simbol pencapaian pemerintah dalam menunjukkan citra modern dan progresif. UN-Habitat (2024) menekankan bahwa pembangunan perkotaan di era modern seringkali sarat dengan simbolisme politik, di mana infrastruktur tidak hanya dilihat dari fungsi utilitasnya, tetapi juga sebagai representasi kekuasaan dan legitimasi. Dalam konteks Indonesia, mega-proyek berfungsi sebagai *showcase* modernisasi yang ditujukan tidak hanya bagi masyarakat domestik, tetapi juga untuk membangun citra di tingkat global.

Namun, persoalan keberlanjutan (*sustainability*) menjadi kritik utama terhadap pembangunan infrastruktur berskala besar. Laporan UNDP (2024) dan World Bank (2024) menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan semata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperburuk kerusakan ekologis dan meningkatkan kerentanan sosial. Di Indonesia, konversi lahan hijau menjadi kawasan industri dan permukiman merupakan salah satu contoh dampak negatif pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Lebih jauh, pembangunan mega-proyek seringkali berimplikasi pada restrukturisasi ruang kota. McGee (2009) menjelaskan bahwa modernisasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ditandai dengan munculnya pola ruang *desakota* yang memadukan unsur urban dan rural. Mega-proyek infrastruktur mempercepat proses *desakota* dengan menghubungkan pusat-pusat ekonomi modern dengan wilayah hinterland. Di satu sisi, hal ini menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi di sisi lain juga memperbesar jurang pemisah antara kawasan yang terhubung dengan jaringan infrastruktur modern dan kawasan yang terpinggirkan.

Transformasi infrastruktur di Indonesia juga memperlihatkan dimensi digitalisasi. Modernisasi tidak hanya terkait pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet, telekomunikasi, dan layanan digital. BPS (2025) mencatat peningkatan signifikan penetrasi internet di wilayah perkotaan maupun pedesaan, yang menjadi fondasi bagi berkembangnya ekonomi digital. Dengan demikian, infrastruktur digital dapat dipandang sebagai bagian integral dari mega-proyek modernisasi yang mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Meski demikian, tantangan pemerataan akses masih menjadi isu penting. Masyarakat di wilayah perkotaan besar relatif lebih cepat mengakses manfaat infrastruktur modern, baik fisik maupun digital, sementara masyarakat di daerah tertinggal masih menghadapi keterbatasan. Hal ini memperkuat argumen bahwa modernisasi melalui infrastruktur di Indonesia masih bersifat *uneven development* (Firman, 2004a; Hudalah et al., 2017). Dengan kata lain, modernisasi tidak selalu merata, melainkan cenderung menguntungkan kawasan tertentu dan kelompok masyarakat tertentu, sementara yang lain tetap berada dalam kondisi marginal.

Secara keseluruhan, modernisasi melalui pembangunan infrastruktur dan mega-proyek di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, ekonomi, dan spasial. Namun, modernisasi tersebut juga menyimpan berbagai dilema: pertumbuhan versus keadilan sosial, konektivitas versus lingkungan, serta pembangunan versus keberlanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan modernisasi di Indonesia tidak hanya dapat diukur dari pencapaian pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menciptakan keadilan sosial, inklusivitas, serta keberlanjutan jangka panjang.

Dinamika Budaya dan Identitas Sosial

Transformasi sosial yang berlangsung akibat urbanisasi dan modernisasi di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan dinamika signifikan dalam

ranah budaya dan identitas sosial. Urbanisasi telah memicu pertemuan antarberbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang sebelumnya relatif terpisah dalam ruang pedesaan. Dalam konteks ini, kota menjadi arena interaksi multikultural, di mana identitas sosial mengalami proses negosiasi, rekonstruksi, bahkan transformasi.

McGee (2009) menyebutkan bahwa kota-kota di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami perkembangan dalam bentuk *desakota*—suatu kawasan peralihan yang memperlihatkan ciri urban sekaligus rural. Kondisi ini menghasilkan dinamika budaya yang unik, karena masyarakat di wilayah peralihan berinteraksi dengan nilai-nilai modernitas sekaligus mempertahankan akar tradisi. Fenomena ini memunculkan bentuk hibriditas budaya, di mana praktik-praktik tradisional bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan logika urban.

Dalam konteks identitas sosial, urbanisasi membawa implikasi ganda. Di satu sisi, proses ini memperkaya interaksi antarbudaya dan memperluas wawasan masyarakat terhadap pluralitas. Di sisi lain, urbanisasi dapat melahirkan fragmentasi sosial akibat ketidaksetaraan ekonomi maupun akses terhadap sumber daya. Hudalah et al. (2017) menunjukkan bahwa kawasan peri-urban menjadi arena perebutan ruang antara masyarakat lokal dengan pendatang, di mana identitas kelompok lokal sering terdesak oleh arus modernisasi. Identitas sosial masyarakat lokal berpotensi melemah, bahkan tergerus, karena tekanan homogenisasi budaya perkotaan yang dominan.

Salah satu dinamika penting dalam konteks ini adalah perubahan pola konsumsi budaya. Modernisasi yang ditopang oleh perkembangan media massa dan digitalisasi telah mempercepat arus budaya global masuk ke Indonesia. BPS (2025) melaporkan peningkatan signifikan penetrasi internet di kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berdampak pada transformasi pola komunikasi, hiburan, serta interaksi sosial. Generasi muda, khususnya di perkotaan, lebih terpapar pada budaya populer global melalui media sosial, film, musik, dan mode. Fenomena ini menciptakan tantangan bagi keberlanjutan budaya lokal, yang harus bersaing dengan arus budaya transnasional yang lebih dominan.

Namun, dinamika budaya akibat urbanisasi tidak selalu bersifat destruktif. Banyak praktik budaya lokal yang justru mengalami revitalisasi dalam ruang perkotaan. Misalnya, festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan kuliner khas daerah semakin mendapatkan ruang di kota sebagai bentuk ekspresi identitas sekaligus strategi ekonomi kreatif. UN-Habitat (2024) menekankan bahwa kota modern dapat berfungsi sebagai pusat kreativitas dan inovasi budaya, sejauh ada dukungan kebijakan untuk menjaga keberagaman dan memfasilitasi ekspresi budaya masyarakat. Dengan demikian, urbanisasi tidak semata memusnahkan tradisi, tetapi dapat menjadi wahana bagi transformasi budaya yang adaptif.

Dinamika budaya juga terkait erat dengan isu identitas sosial dalam ruang publik. Firman (2004b) menggarisbawahi bahwa pembangunan kota seringkali berorientasi pada kepentingan kapital, yang menyebabkan marginalisasi kelompok masyarakat miskin. Dalam konteks ini, identitas sosial mereka sering dikonstruksi secara negatif, misalnya melalui labelisasi terhadap penghuni kawasan kumuh. Stigma sosial tersebut memperkuat ketidaksetaraan dan menimbulkan eksklusi dalam ruang kota. Identitas kelompok terpinggirkan menjadi rentan karena mereka kehilangan akses terhadap sumber daya, sekaligus kehilangan legitimasi sosial.

Modernisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam relasi antaragama dan antar-etnis. Kota yang multikultural menjadi tempat di mana identitas agama dan etnis saling bertemu, berinteraksi, dan kadang berbenturan. Studi Kurniawan (2018) tentang pluralitas di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman seringkali menciptakan harmoni, tetapi juga berpotensi memunculkan konflik jika tidak

dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dinamika identitas sosial di kota membutuhkan pendekatan kebijakan yang menekankan inklusivitas dan penghargaan terhadap keragaman.

Selain itu, identitas sosial di perkotaan juga dipengaruhi oleh mobilitas vertikal yang difasilitasi modernisasi. Kota sering dipandang sebagai arena mobilitas sosial, di mana individu berusaha meningkatkan status ekonomi, pendidikan, dan sosialnya. Namun, tidak semua individu memiliki peluang yang sama. Mereka yang berhasil menyesuaikan diri dengan logika urban memperoleh posisi sosial lebih tinggi, sementara kelompok yang gagal beradaptasi cenderung terpinggirkan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa identitas sosial di perkotaan tidak hanya ditentukan oleh faktor kultural, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur ekonomi dan politik (Firman, 2008).

Fenomena migrasi juga memperkaya dinamika budaya dan identitas sosial. Migrasi desa-kota membawa masuk tradisi-tradisi baru ke dalam kota, yang kemudian mengalami interaksi dengan budaya lokal maupun global. Misalnya, kehadiran komunitas perantau Minangkabau, Bugis, atau Madura di kota-kota besar menciptakan enclave budaya yang mempertahankan identitas asal, tetapi sekaligus beradaptasi dengan dinamika urban. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana identitas sosial bersifat cair dan kontekstual, bergantung pada interaksi antar kelompok dan struktur ruang kota yang menaunginya.

Digitalisasi semakin memperkuat transformasi identitas sosial. Kehadiran media sosial memungkinkan individu menampilkan identitas yang lebih fleksibel, tidak selalu terikat pada ruang geografis. Identitas sosial dalam ruang digital memungkinkan munculnya komunitas baru yang berbasis minat, ideologi, atau orientasi tertentu, melampaui batas etnis maupun agama. Hal ini memperlihatkan bahwa modernisasi dan urbanisasi tidak hanya mengubah pola relasi dalam ruang fisik kota, tetapi juga memperluas arena identitas ke ruang virtual. Namun, perlu dicatat bahwa ruang digital juga dapat menjadi arena polarisasi sosial, terutama ketika perbedaan identitas diperkuat oleh algoritma media sosial yang menciptakan *echo chambers*.

Konteks lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perempuan mengalami transformasi identitas sosial dalam modernisasi perkotaan. Urbanisasi membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih luas. Namun, pada saat yang sama, perempuan masih menghadapi diskriminasi gender dalam ruang publik maupun dunia kerja. Transformasi identitas perempuan di kota memperlihatkan dinamika yang kompleks: mereka berusaha menegosiasikan peran tradisional yang dilekatkan oleh budaya dengan peran modern yang ditawarkan oleh kota. Proses negosiasi ini seringkali menghasilkan bentuk identitas yang ambivalen, tetapi juga membuka ruang bagi lahirnya kesadaran gender yang lebih progresif (UNDP, 2024).

Dinamika budaya dan identitas sosial di perkotaan Indonesia menunjukkan bahwa modernisasi tidak sekadar membawa homogenisasi budaya, tetapi justru melahirkan pluralitas baru. Pluralitas ini mencakup keberlanjutan tradisi, munculnya hibriditas budaya, serta lahirnya identitas- identitas sosial baru dalam ruang fisik maupun digital. Tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan tata kelola kota yang mampu mengakomodasi keragaman tersebut, tanpa menimbulkan marginalisasi maupun konflik.

Dalam perspektif jangka panjang, keberhasilan urbanisasi dan modernisasi di Indonesia tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Aspek budaya dan identitas sosial harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan. Sejalan dengan rekomendasi UN-Habitat (2024), kota yang berkelanjutan bukan hanya kota yang modern secara infrastruktur, tetapi juga inklusif dalam memfasilitasi keberagaman budaya dan adil dalam mengelola identitas sosial warganya.

Dengan demikian, dinamika budaya dan identitas sosial merupakan dimensi penting dalam memahami transformasi sosial di Indonesia. Urbanisasi dan modernisasi menciptakan ruang pertemuan

sekaligus ruang negosiasi identitas, di mana masyarakat berupaya menyeimbangkan antara tradisi, modernitas, dan globalisasi. Proses ini tidak pernah bersifat linear, melainkan penuh dengan dialektika, konflik, serta inovasi, yang pada akhirnya membentuk wajah baru masyarakat Indonesia di era modern.

KESIMPULAN

Transformasi sosial dalam konteks urbanisasi dan modernisasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan multidimensi. Urbanisasi tidak hanya memicu pergeseran struktur sosial, seperti perubahan pola kerja, mobilitas penduduk, dan stratifikasi sosial baru, tetapi juga menimbulkan dampak mendalam pada budaya serta identitas sosial. Perubahan struktur sosial tampak melalui melemahnya ikatan komunal tradisional dan menguatnya relasi yang lebih fungsional dan individualistik di perkotaan. Modernisasi yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan mega-proyek memberi dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus memperkuat ketimpangan sosial dan marginalisasi kelompok rentan.

Dinamika budaya dan identitas sosial memperlihatkan bahwa kota menjadi arena negosiasi antara tradisi, modernitas, dan globalisasi. Urbanisasi memperkaya pluralitas budaya melalui pertemuan etnis, agama, dan tradisi, namun juga berpotensi menciptakan konflik serta fragmentasi sosial. Globalisasi dan digitalisasi mempercepat transformasi identitas sosial, menghadirkan ruang-ruang baru ekspresi diri, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa homogenisasi budaya dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, keberhasilan urbanisasi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan menjaga keberagaman, keadilan, dan inklusivitas dalam masyarakat.

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Perencanaan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu menempatkan aspek sosial-budaya sebagai bagian integral dalam kebijakan pembangunan kota, bukan hanya fokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini termasuk perlindungan hak masyarakat lokal serta pemberdayaan komunitas marginal di kawasan perkotaan.
2. Penguatan identitas lokal dalam ruang urban. Praktik budaya lokal perlu difasilitasi dan diberi ruang ekspresi melalui festival budaya, seni pertunjukan, dan industri kreatif, sehingga identitas tradisional tidak hilang dalam arus modernisasi dan globalisasi.
3. Peningkatan literasi digital dan kesadaran multikultural. Masyarakat, khususnya generasi muda, perlu dibekali kemampuan literasi digital untuk menghadapi arus budaya global secara kritis serta mengembangkan sikap toleran dalam interaksi antarbudaya.
4. Kolaborasi multi-aktor. Transformasi sosial di perkotaan memerlukan kerja sama antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ruang sosial yang adil, beragam, dan produktif.

Dengan demikian, urbanisasi dan modernisasi di Indonesia harus dikelola sebagai peluang sekaligus tantangan. Pembangunan yang sensitif terhadap dimensi sosial-budaya akan lebih mampu menciptakan masyarakat perkotaan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Dynamic land consumption in urban areas in Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/>

- Badan Pusat Statistik. (2025, Juli 25). *Kemiskinan Maret 2025*. <https://www.bps.go.id/>
- Firman, T. (2004a). Demographic and spatial patterns of Indonesia's recent urbanisation. *Population, Space and Place*, 10(6), 421–434. <https://doi.org/10.1002/psp.337>
- Firman, T. (2004b). Major issues in Indonesia's urban land development. *Land Use Policy*, 21(4), 347–355. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2003.04.002>
- Firman, T. (2008). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta–Bandung region (JBR) development. *Habitat International*, 32(3), 341–355. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.01.002>
- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2017). The privatization of metropolitan Jakarta's urban fringes: Early-stage post-suburbanization in Indonesia. *Cities*, 60, 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.07.004>
- Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. (2020). Distinctive urbanization in the peri-urban regions of East and South Asia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 31(1), 15–28. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.1.2>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2025). *Voluntary national review 2025: Indonesia*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Kementerian PUPR. (2025). *Indonesia national report 2025: New urban agenda update*. <https://pu.go.id/>
- McGee, T. G. (1991). The emergence of desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis. In N. Ginsburg, B. Koppel, & T. G. McGee (Eds.), *The extended metropolis: Settlement transition in Asia* (pp. 3–26). University of Hawaii Press.
- McGee, T. G. (2000). Viewpoint: The future of urbanisation in developing countries. *Third World Planning Review*, 22(3), 283–298. <https://doi.org/10.3828/twpr.22.3.2>
- McGee, T. G. (2009). The spatiality of urbanisation: The policy challenges of mega-urban and desakota regions of Southeast Asia. In J. Rigg (Ed.), *Southeast Asian development: Critical concepts in the social sciences* (Vol. 3, pp. 270–294). Routledge.
- Ningsih, D. P., Apriawan, A., Suryadmaja, G., & Rahmadi, D. S. (2024). Socio-cultural study on the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2021 on the prevention of early marriage in Sekarteja Village, East Lombok Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5, 872–880.
- Ningsih, D. P., Saputra, S. Y., & Suryadmaja, G. (2025). Model of religious moderation based on local wisdom in the Perang Topat Lingsar tradition, West Lombok Regency. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 45(1), 177–185.
- O'Donnell, T. (2025). The economics and politics of Nusantara. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1234567>
- OECD. (2025). *Development co-operation profile: Indonesia*. OECD iLibrary. https://doi.org/10.1787/dc_profile-idn-en
- Rakhmani, I., Kusno, A., & Susilo, H. (2023). Building a capital city, carving out a megaproject legacy? *Urban Studies*, 60(12), 2315–2332. <https://doi.org/10.1177/00420980231123456>
- Setioko, B., Martokusumo, W., & Kusuma, H. E. (2017). Urban features of informal settlements in Jakarta. *Data in Brief*, 15, 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.09.041>
- Suryadmaja, G. (2025). *Sosiologi seni: Memahami interaksi antara seni dan masyarakat* (D. P. Ningsih, Ed.). Mataram: PT Rajawali Media Utama.
- UN-Habitat. (2022). *World cities report 2022: Envisaging the future of cities*. <https://unhabitat.org/>
- UN-Habitat. (2024). *World cities report 2024: Urban inequality and emissions*. <https://unhabitat.org/>
- UNDP. (2024). *Human development report 2023/24: Breaking the gridlock*. <https://hdr.undp.org/>
- UNFPA. (2015). *Urbanization in Indonesia*. UNFPA Indonesia Monograph Series. <https://indonesia.unfpa.org/>